

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Yanuarita Delciana Rere
Yanuariadelcianarere@gmail.com
Endang Dwi Retnani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of budget objectives accuracy, budgeting participation, and quality of human resources on performance accountability of local government agencies at the Regional Device Work Unit (SKPD) Surabaya. The sample used in this research consisted of 30 SKPD Surabaya. This research is a quantitative research. The sampling technique used purposive sampling method. Data collection techniques used in this research using survey methods. The data used are primary data in the form of questionnaires distributed to respondents. Data analysis method used is multiple linear analysis using SPSS (Statistical Product and Service Solution) application tool. The results of this research indicates that the accuracy of budget targets has a positive influence on the performance accountability of government agencies Surabaya, improving the accuracy of budget targets in the planning, evaluation and action on each activity can improve the accountability of the performance of government agencies Surabaya. The participation of budget preparation has a positive influence on the performance accountability of government agencies Surabaya, it shows that to improve accountability of government agencies Surabaya, participation of budgetary and human resources quality is influential on accountability of government agencies Surabaya, it shows that to improve accountability of local government institution performance is needed quality human resources.

Keywords: accuracy of budget targets, budgetary participation, quality of human resources, performance accountability of government agencies.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ketepatan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, dan kualitas sumber daya manusia pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya. Sampel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 30 SKPD Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuisioner yang dibagikan kepada responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solution). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Surabaya, peningkatan ketepatan sasaran anggaran dalam perencanaan, evaluasi dan tindakan terhadap setiap kegiatan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Surabaya. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Surabaya, hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Surabaya diperlukan partisipasi penyusunan anggaran dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Surabaya diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kata Kunci : ketepatan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Pengertian otonomi daerah yang digunakan yaitu pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut, otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban suatu daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat sehingga daerah tersebut lebih mandiri dan pembangunan nasional menjadi lebih maju.

Sebagai salah satu implementasi dari manajemen berbasis kinerja pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, anggaran merupakan alat yang digunakan dalam menyusun proses penyusunan rencana kerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam penyusunan rencana kerja masing-masing program SKPD mencakup semua perincian uraian mengenai nama program, periode pelaksanaan program, sumber daya yang dibutuhkan, alokasi dan indikator kerja.

Peran kebijakan pemerintah yang efektif dan efisien sangat penting diperlukan baik dalam kebijakan ekonomi untuk daerah maupun kebijakan ekonomi untuk pemerintah pusat. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya. Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan mengenai pertanggungjawaban yang telah dipercayakan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan administrasi pemerintahan yang berhubungan dengan anggaran.

Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial karena itu menjadi hal penting bagi suatu organisasi. Di dalam kinerja terdapat gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi suatu organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Untuk dapat mengetahui apakah kinerja tersebut efektif atau tidak efektif harus dilakukan penilaian terhadap anggaran.

Perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu faktor utama yang harus diperhatikan dengan baik oleh pemerintah. Karena belum optimalnya proses perencanaan dan penganggaran yang baik mengakibatkan kinerja pemerintahan di beberapa daerah di Indonesia menjadi rendah. Akibatnya, daya serap yang rendah memunculkan masalah pengelolaan keuangan daerah yang buruk (Nurhalimah, 2013). Untuk menghindari permasalahan seperti yang diketahui, Pemerintah Daerah Kota Surabaya harus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Karena dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya komitmen bersama dari semua anggota dalam satuan organisasi/lembaga untuk mewujudkan fungsi dan tugas pemerintahan yang bersih, berkualitas dan mengedepankan unsur-unsur efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam memberikan layanan prima kepada publik.

Akuntabilitas adalah perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai dalam rangka pencapaian tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Akuntabilitas juga merupakan salah satu unsur pokok yang harus dipenuhi dalam mewujudkan *good governance* yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Melalui laporan akuntabilitas masyarakat dapat menilai apakah pemerintah daerah telah mencapai tujuan yang diharapkan, dan apakah kepercayaan yang diberikan untuk mengelola sumber daya yang ada telah dimanfaatkan dengan baik.

Anggaran dipandang sebagai alat perencanaan dan pengendalian yang sangat penting, sehingga proses penyusunan anggaran merupakan aspek penting dalam pencapaian

keberhasilan dari suatu organisasi. Menurut Ellen (2011), kegunaan anggaran adalah sebagai alat pengawasan kinerja, artinya anggaran merupakan mata rantai yang berkesinambungan dengan proses penganggaran, dimana suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kemampuan manajemen untuk mencapai tujuan organisasinya. Oleh sebab itu, pada akhirnya akan kembali berdampak pada kinerja manajerial. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Sehingga sasaran anggaran harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab untuk menyusun dan melaksanakannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ketepatan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah? Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh ketepatan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran dan kualitas sumber daya manusia pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

TINJAUAN TEORITIS

Anggaran

Menurut Pratiwy (2013), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Seluruh komponen organisasi mulai dari *top management* hingga para staf memegang peranan penting mulai dari proses perencanaan, penerapan, hingga evaluasi anggaran manajer (pemimpin) dan para staf yang terkait didalamnya. Sasongko dan Parulian (2015:2) berpendapat bahwa anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Anggaran disusun manajemen dalam jangka waktu satu tahun untuk membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang diperhitungkan.

Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran, dimana setiap manajer dalam organisasi diberi peran untuk melaksanakan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Proses penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu: a) *Top-Down Approach* (pendekatan dari atas ke bawah) dalam pendekatan ini, proses penyusunan anggaran dimulai dari manajer puncak. Anggaran disusun dan ditetapkan oleh pimpinan dan anggaran harus dilaksanakan bawahan. Anggaran *top-down approach* mempunyai kelemahan antara lain: kurangnya komitmen bawahan, seringkali tidak dapat dilaksanakan, dan sulit berhasil mencapai tujuan. Dan keunggulan pendekatan ini antara lain: adanya dukungan yang kuat dari manajer puncak dalam pengembangan anggaran dan proses penyusunan menjadi lebih mudah dikendalikan oleh manajer puncak.; b) *Bottom-Up Approach* (pendekatan dari bawah ke atas) dalam pendekatan ini, anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai ke atasan. Bawahan diserahkan sepenuhnya untuk menyusun anggaran yang akan dicapai di masa mendatang. Metode ini digunakan jika karyawan sudah memiliki kemampuan menyusun anggaran dan tidak dikhawatirkan menimbulkan proses yang lama dan berbelarut. Meskipun dapat menciptakan komitmen manajemen bawah, namun anggaran *bottom-up* mempunyai kelemahan sebagai berikut: seringkali tidak mempertimbangkan keselarasan tujuan, kurang terkendali, tujuan yang ingin di capai terlalu mudah.

Ketepatan Sasaran Anggaran

Ketepatan sasaran anggaran dalam sistem pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja yang terjadi dilapangan apakah tepat pada

sasaran pembangunan masyarakat dan perkembangan masyarakat. Aparatur pemerintah daerah memiliki kejelasan untuk mengelolah keuangan dengan tepat sehingga penyusunan anggaran pada periode selanjutnya dapat tercapai dengan baik pada instansi pemerintah.

Dalam sektor publik, ketepatan anggaran diukur dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya dalam periode setahun. Adanya tuntutan dari masyarakat agar anggaran yang efektif dan efisien serta adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 93 PMK.02/2011 yang menyebutkan mengenai Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Menurut Locke dan Latham (1984) dalam Putra (2013:6) agar pengukuran sasaran efektif ada 7 indikator yang diperlukan: (a) tujuan; (b) kinerja; (c) standar; (d) jangka waktu; (e) sasaran prioritas; (f) tingkat kesulitan; (g) koordinasi.

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Menurut Nurcahyani (2010), partisipasi anggaran adalah tahap partisipasi pegawai dalam menyusun anggaran dan pengaruh anggaran tersebut terhadap pusat pertanggungjawaban. Partisipasi anggaran dari setiap SKPD memiliki peranan penting. Masing-masing satuan kerja ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja. Indikator partisipasi anggaran Brownell (dalam Falikhatum, 2007) adalah: (a) Keterlibatan; (b) Pengaruh; (c) Komitmen.

Proses penyusunan anggaran akan menetapkan siapa yang akan berperan dalam melaksanakan sebagian kegiatan pencapaian sasaran anggaran dan ditetapkan pula sumber daya yang disediakan bagi pemegang peran tersebut untuk memungkinkan melaksanakan perannya. Peran tersebut menuntut manajer untuk bisa mengarahkan bawahan agar bekerja dengan maksimal guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Yosefrinaldi, 2013).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 kapasitas sumber daya manusia yang baik akan berdampak pada kinerja organisasi yang baik, dan salah satu pengukuran baiknya kinerja organisasi adalah pada pelaporan keuangannya, apakah telah tersaji secara andal dan tepat waktu. Pada kenyataannya, banyak sumber daya manusia yang bekerja pada organisasi pemerintahan, khususnya pada bagian penatausahaan keuangan, kurang memahami tentang sistem akuntansi yang telah ditetapkan.

Menurut Ardiansyah (2013), bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Kualitas SDM memegang peranan penting dalam sebuah organisasi, oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan SDM dibidang akuntansi pemerintahan. Dessler dalam Suci (2013) ukuran kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari: (a) pendidikan; (b) pelatihan; (c) pengalaman.

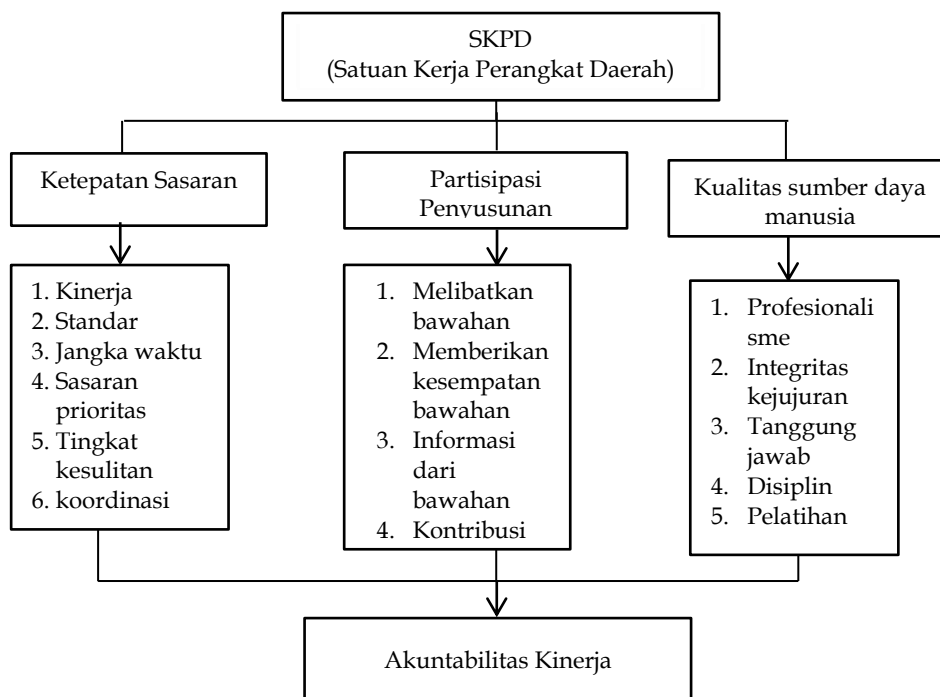
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam ketentuan umum Perpres No.29/2014 disebutkan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Instansi pemerintah yang wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing, selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Berdasarkan SK Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang pedoman penyusunan dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. (2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. (4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. (5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. (6) Harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian dan tujuan yang telah ditetapkan.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu maka dengan adanya kejelasan sasaran anggaran yang dinyatakan secara spesifik maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi sehingga akan mendorong pegawai untuk melakukan yang terbaik dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Meningkatnya kejelasan sasaran anggaran maka akan diikuti dengan meningkatnya ketepatan anggaran pendapatan dan belanja di SKPD. Penelitian-penelitian tentang anggaran sudah banyak dilakukan, sementara penelitian ketepatan anggaran sepanjang pengetahuan penulis masih sedikit dilakukan. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Astari (2015). Dengan demikian hipotesisnya adalah:

H₁ : Ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Partisipasi penyusunan anggaran diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan keikutsertaan dua orang atau lebih dalam menyusun dan memutuskan anggaran secara bersama. Keterlibatan seluruh pegawai dalam suatu organisasi sangatlah penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi tersebut. Dengan adanya keterlibatan tersebut akan mendorong para pegawai dan kepala bagian untuk bertanggungjawab terhadap masing-masing tugas yang diembannya sehingga pegawai dan kepala bagian dapat meningkatkan kinerja agar tercapainya target anggaran Dewi, et al (2015). Menurut penelitian Dewi, et al (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara partisipasi anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Pengujian ini membuktikan bahwa keterlibatan individu dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesisnya adalah:

H₂ : Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber daya manusia merupakan *human capital* didalam organisasi. Human capital yang dimaksud berupa pengetahuan, pendidikan, sikap, hubungan, produktivitas, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan sebagai input dalam pengelolaan kinerja yang maksimal. Menurut Ariesta (2013), mengatakan apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang diisyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akibatnya kualitasnya menjadi buruk. Menurut penelitian Dewi, et al (2015) mengemukakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesisnya adalah:

H₃ : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu menganalisis data dengan bentuk angka yang dipusatkan pada pengujian hipotesis. Populasi penelitian merupakan obyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat

tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu jumlah pejabat struktural dan karyawan/staf pada SKPD Kota Surabaya di luar kecamatan.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, ditetapkan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sekaran (2006), *purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti. Peneliti hanya mengambil 30 SKPD yang ada di Kota Surabaya di luar kecamatan.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek merupakan jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian yang berisikan daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan metode *survey* dengan bantuan kuisisioner.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Ketepatan Sasaran Anggaran

Ketepatan sasaran anggaran didefinisikan sebagai perbandingan antara realisasi dari setiap kegiatan dalam organisasi tidak melebihi atau sama dengan anggaran. Indikator yang mempengaruhi ketepatan sasaran anggaran yaitu: (a) kinerja; (b) standar; (c) jangka waktu; (d) sasaran prioritas; (e) tingkat kesulitan; (f) koordinasi.

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi penyusunan anggaran adalah partisipasi manajerial SKPD dalam proses penganggaran daerah, seperti program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, keikutsertaan dan menentukan target dan anggaran. Untuk mengukur variabel ini menggunakan *skala likert* dan menunjukkan tingkat partisipasi aparat dalam menyusun anggaran. Terdapat 4 indikator menurut Bangun (2009), yaitu: (a) melibatkan bawahan; (b) memberi kesempatan bawahan; (c) informasi bawahan; (d) kontribusi bawahan.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan penilaian bagi unsur-unsur sikap, pola pemikiran, dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang manusia dalam hal menerapkan pola kinerja yang ditugaskan sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan apa yang telah dimiliki. Indikator pengukuran yang digunakan yaitu: (a) profesionalisme; (b) integritas kejujuran; (c) tanggung jawab; (d) disiplin; (pelatihan).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu: (a) kelompok masukan; (b) kelompok proses; (c) kelompok keluaran; (d) kelompok hasil; (e) kelompok manfaat; (f) kelompok dampak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Dalam kuisioner ini terdapat pernyataan-pernyataan dalam bentuk skala *likert* untuk masing-masing variabel, baik itu dependen maupun independen yang digunakan dalam penelitian ini. Pernyataan-pernyataan tersebut berhubungan dengan ketepatan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berikut hasil pengujian statistik deskriptif.

Tabel 1
Hasil Uji statistik deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
KSA	42	2.00	5.00	4.24205	0.72264667
PPA	42	2.00	5.00	4.4095	0.621174
SDM	42	2.00	5.00	4.21666	0.707856
AKP	42	2.00	5.00	4.158717	0.739043
Valid N (listwise)	42				

Sumber: Data primer diolah, 2018

Hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa variabel ketepatan sasaran anggaran menunjukkan nilai minimum 2, maksimal 5, mean 4,24205 dan standar deviasi 0,72264667. Nilai mean mengindikasikan bahwa jawaban responden pada variabel ketepatan sasaran anggaran relatif homogen atau baik. Variabel partisipasi penyusunan anggaran menunjukkan nilai minimum 2, maksimal 5, mean 4,4095 dan standar deviasi 0,621174. Nilai mean mengindikasikan bahwa jawaban responden pada variabel partisipasi penyusunan anggaran relatif homogen atau baik. Variabel kualitas sumber daya manusia menunjukkan nilai minimum 2, maksimal 5, mean 4,21666 dan standar deviasi 0,707856. Nilai mean mengindikasikan bahwa jawaban responden pada variabel kualitas sumber daya manusia relatif homogen atau baik. Variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan nilai minimum 2, maksimal 5, mean 4,158717 dan standar deviasi 0,739043. Nilai mean mengindikasikan bahwa jawaban responden pada variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah relatif homogen atau baik.

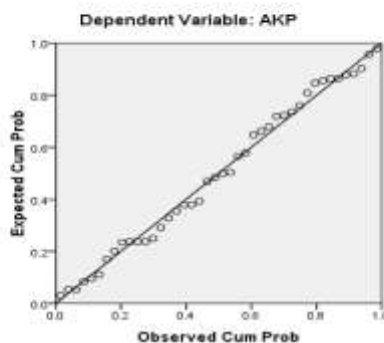
Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi terpenuhinya asumsi-asumsi dalam model regresi linear berganda dan untuk menginterpretasikan data agar lebih relevan dalam menganalisis. Pengujian asumsi klasik meliputi:

Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi antara variabel *dependen* (terikat) dan variabel *independen* (bebas) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak yang dapat dilihat dengan menggunakan Normal P-P Plot dan Diagram Histogram yang tidak condong ke kiri maupun ke kanan.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data primer diolah, 2018
Gambar 2
Uji Normalitas

Berdasarkan pada gambar 2 *Normal P-P Ploy Regression Standardized* di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. selain itu untuk menguji normalitas residual dengan menggunakan uji statistik non-parametik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual mendistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal. Berikut hasil uji normalitas dilihat pada perhitungan statistik pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Understandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^a	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,85274397
Most Extreme Difference	Absolute	,070
	Positif	,068
	Negative	-,070
Kolmogorov-Smirnov Z		,456
Asymp.Sig. (2-tailed)		,985

a. Test distribution is Normal

Sumber: Data primer diolah, 2018

Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi adalah melihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF) dan lawannya nilai tolenrance. Apabila nilai tolerance mendekati 1, serta nilai VIF disekitar angka 1 serta tidak lebih dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas dalam model regresi. Berikut hasil pengujian multikolinieritas dengan menggunakan SPSS yang disajikan pada tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

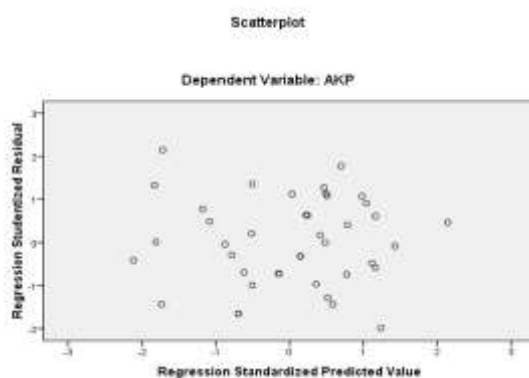
Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
KSA	0,229	4,371
PPA	0,682	1,467
SDM	0,239	4,188

Sumber: Data primer diolah, 2018

Dari tabel 3 menunjukkan bahwa nilai VIF dalam kolom *Collinearity statistics* untuk variabel ketepatan sasaran anggaran sebesar 4,371, partisipasi penyusunan anggaran sebesar 1,467, kualitas sumber daya manusia sebesar 4,188. Kesimpulan dari pengujian ini adalah nilai VIF dari variabel ketepatan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia tidak lebih atau <10 . Nilai tolerance dalam kolom *Collinearity statistics* untuk variabel ketepatan sasaran anggaran sebesar 0,229, partisipasi penyusunan anggaran sebesar 0,682, kualitas sumber daya manusia sebesar 0,239 tidak kurang atau $> 0,1$. Maka kesimpulan dari pengujian ini adalah tidak terjadi multikolinieritas (tidak terjadi adanya korelasi diantara variabel independen).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi perbedaan residual dari suatu periode pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variabel residual dari suatu periode pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas, dan jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat gambar hasil SPSS berikut ini:



Sumber: Data primer diolah, 2018

Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Linear Berganda

Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu mengenai ketepatan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran dan kualitas sumber daya manusia pada akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya. Berikut ini hasil dari perhitungan regresi berganda:

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized	Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	-8,066	2,315	-3,485	,001
KSA	,583	,142	4,111	,000
PPA	,393	,105	3,738	,001
SDM	,225	,100	2,251	,030

a. Dependent Variable: AKP

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4, maka prediksi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$AKP = -8,066 + 0,583KSA + 0,393PPA + 0,225SDM + e$$

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dapat dilihat pada tabel 5 adalah hasil koefisien determinasi.

Tabel 5
Hasil Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error the Estimate
1	,932 ^a	,868	,858	,88577

a. Predictors: (Constant), SDM, PPA, KSA

b. Dependen Variabel: AKP

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,868 yang berarti kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen ketepatan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran dan kualitas sumber daya manusia terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 86,8%, sedangkan sisanya 13,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model. Nilai R² mendekati angka 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Uji F (goodness of fit)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan α sebesar 5%. Sehingga dapat dilihat apakah model masuk dalam kategori cocok (*fit*) atau tidak. Dapat dilihat pada tabel 6 adalah hasil Uji F.

Tabel 6
Uji F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	196,091	3	65,364	83,310	,000 ^a
1 Residual	29,814	38	,785		
Total	225,905	41			

a. Predictors: (Constant), SDM, PPA, KSA

b. Dependent Variabel: AKP

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 83,310 dengan tingkat signifikan 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini cocok atau *fit*.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis yaitu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan variabel lain yang dianggap konstan. Hal tersebut mengidentifikasi apakah masing-masing variabel bebas ketepatan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, dan kualitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Prosedur penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-8,066	2,315		-3,485	,001
1 KSA	,583	,142	,506	4,111	,000
PPA	,393	,105	,267	3,738	,001
SDM	,225	,100	,272	2,251	,030

a. Dependent Variabel: AKP

Sumber: Data primer diolah, 2018

Ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan hipotesis pertama (H_1) diterima.

Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ dan hipotesis kedua (H_2) diterima.

Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,030 < 0,05$ dan hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil pengolahan data statistik menyatakan hipotesis pertama (H_1) diterima yaitu ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah. Sehingga diartikan bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan adanya ketepatan sasaran anggaran. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Annisa (2013), Anjarwati (2012) serta Darma (2004) yang meneliti tentang kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi menunjukkan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kinerja manajerial, sedangkan komitmen organisasi tidak dapat memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial. Sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, dan untuk mengetahui kinerja yang terjadi di lapangan apakah tepat pada sasaran pembangunan dan perkembangan masyarakat. Dengan adanya ketepatan sasaran anggaran maka aparat dapat menentukan target dalam mencapai anggaran sehingga apa yang telah di targetkan pada awalnya dapat terealisasi dengan baik.

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

Dari hasil pengolahan data statistik menyatakan hipotesis kedua (H_2) diterima yaitu partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga diartikan bahwa untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah diperlukan partisipasi penyusunan anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2009) dan Nurhalimah (2013), bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD. Adanya partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah adalah menunjukkan pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penganggaran daerah, diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui negosiasi terhadap anggaran. Hal ini didasari pemikiran bahwa ketika suatu tujuan atau sasaran yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka para penyusun akan mempertanggungjawabkan dan memiliki rasa sungguh-sungguh untuk mencapainya, jadi dengan keikutsertaan bawahan dalam proses penyusunan anggaran, para bawahan tersebut merasa puas, produktif dan dihargai dengan begitu partisipasi anggaran mampu membentuk sikap, perilaku karyawan dan dapat memunculkan rasa memilih terhadap organisasi dan menumbuhkan pengaruh motivasi terhadap tujuan anggaran.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil pengolahan data statistik menyatakan hipotesis ketiga (H_3) diterima yaitu kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga dapat diartikan bahwa untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan agar kinerja yang dihasilkan telah sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi et al (2014) mengemukakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka kinerja pemerintah juga akan semakin tinggi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh ketepatan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran dan kualitas sumber daya manusia pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap hasil kuisioner yang dibagikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Peningkatan ketepatan sasaran anggaran dalam perencanaan, evaluasi dan tindakan terhadap setiap kegiatan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya; (2) Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah diperlukan partisipasi penyusunan anggaran; (3) Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia, maka semakin baik akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh ketepatan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka saran yang dapat diajukan peneliti adalah sebagai berikut: (1) Peneliti selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan metode survey dengan cara menyebarkan kuisioner saja, tetapi juga ditambah dengan melakukan wawancara secara langsung, agar peneliti dapat melihat langsung bagaimana responden memberikan jawaban; (2) Peneliti selanjutnya hendaknya memperluas obyek penelitian, tidak hanya pada SKPD Kota Surabaya tetapi juga di kota atau kabupaten lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, S. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang). *Jurnal. Universitas Negeri Padang*. Padang.
- Anjarwati, M. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Ardiansyah. 2013. Pengaruh Iklim Organisasi terhadap Komitmen Organisasional dengan Keputusan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Karyawan PT Gudang Garam (Persero). *Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga*. Surabaya.
- Ariesta, F. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemda (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat). *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*. Padang.
- Astari. 2015. Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Manajerial Sektor Publik pada Akuntabilitas Kinerja SKPD. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Bali.
- Bangun, A. 2009. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ITMI. Medan.
- Darma, E. S. 2004. Pengaruh Kejelasan Sasaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi

- pada Pemerintah Daerah. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Dewi, N., L. P. Sandrya dan G. W. Yasa. 2012. Analisis Pengaruh Anggaran Partisipatif pada Budgetary Slack dengan Empat Variabel Moderasi (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Badung, Bali). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Udaya. Bali.
- Dewi, N. P. Purnama dan N. M. A. Erawati. 2014. Pengaruh Partisipasi Penganggaran, Informasi Asimetris, Penekanan Anggaran dan Komitmen Organisasi Pada Senjangan Anggaran. *E-jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Bali.
- Dewi, M. S., N. A. S. Dharmawan, dan D. N. S. Werastuti. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Pendidikan Ganesha. Bali.
- Dewi, Sartika, dan D. F. Rasmini. 2015. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Ellen. 2011. *Anggaran Perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Falikhatum. 2007. Interaksi Informasi Asimetri, Budaya Organisasi dan *Group Cohesiveness* dalam Hubungan Antara Partisipasi Penganggaran dan *Budgetary Slack*. *Symposium Nasional Akuntansi (SNA) X*. Makasar.
- Lesmana, Desi dan M. Maimunah. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderisasi pada Intansi Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Palembang. Buletin Ekonomi. Palembang.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Keempat*. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2011. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Nurchayani, K. 2010. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui komitmen organisasi dan persepsi inovasi sebagai variabel intervening. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nurhalimah. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah (Studi pada Pemerintahan Kota Aceh) *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Islam Banda Aceh. Aceh.
- Pratiwy, T. 2013. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Bandung.
- Sasongko dan Parulian. 2015. *Anggaran*. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Sekaran. 2006. *Research Methods for Business*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suci. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Dan Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Wulandari, N. 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang.
- _____, I. 2009. Pengaruh Karakteristik Gaya Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Yosefrinaldi. 2013. Pengaruh Kepastian Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel

Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah se-Sumatra Barat). *Jurnal Akuntansi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang.